

"Kenaikan Biaya Batu Bara Rp15 Triliun Setara 1.200 MW Pembangkit EBT Baru"

- **Kenaikan harga hanya menguntungkan pemegang konsesi batu bara yang memasok PLN.**
- **Indonesia mesti memanfaatkan EBT yang melimpah dan tinggalkan sumber energi fosil.**

JAKARTA - Pemerintah diingatkan agar menjaga integritas komitmen untuk mewujudkan lingkungan hijau dan mengembangkan **energi baru terbarukan (EBT)** dalam penerbitan *green bond*. Oleh karena itu, pemerintah mesti menunjukkan langkah nyata untuk mengurangi, bahkan meninggalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang terbukti biaya dan dampaknya luar biasa mahal. Hal itu juga bertujuan menyelamatkan keuangan **PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)**.

Sebab, dengan tren kenaikan harga batu bara seperti saat ini, PLN mesti menanggung kenaikan biaya hingga 15 triliun rupiah per tahun. Jumlah tersebut setara dengan pembangunan 1.200 megawatt (MW) pembangkit listrik (PLT) EBT baru.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, YS Susilo, mengemukakan kenaikan harga batu bara membuat PLN kehilangan 15 triliun rupiah secara sia-sia. Padahal, tambahan biaya tersebut seharusnya bisa menjadi investasi penambahan kapasitas PLT EBT baru.

"Kenaikan harga baru bara hanya menambah biaya PLN tanpa meningkatkan kapasitas pembangkitnya. Ini hanya menguntungkan pemegang konsesi batu bara yang memasok PLN," ungkap dia, ketika dihubungi, Minggu (25/2).

Susilo menambahkan, saat ini 60 persen pembangkit listrik PLN berbasis batu bara sehingga tidak bisa begitu saja beralih ke EBT, sebab telah terikat kontrak dengan teknologi afkiran selama 30 tahun.

"PLN terperangkap sumber energi mahal. Semua itu beresiko tinggi bagi PLN untuk diteruskan. Akibatnya, bauran energi EBT malah semakin menjauhi target," tukas dia.

Menurut dia, apabila kebijakan pemerintah masih seperti sekarang, memprioritaskan energi batu bara, maka porsi batu bara dalam bauran energi akan meningkat dari 60 persen saat ini pecah ke 75 persen pada 2026. Sebaiknya, tanpa tambahan yang signifikan, porsi EBT dari sekitar 3 persen akan turun di bawah 2 persen.

"Kita sudah buktikan bahwa batu bara tidak murah, polutif, dan teknologi afkiran. Tapi kenapa terus ditambah. Itu masalahnya, sedangkan EBT tidak ditambah secara signifikan. Target kenaikan porsi EBT harus diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan, bukan Cuma target di atas kertas," tutur dia.

Padahal, papar Susilo, Indonesia diberkahi EBT yang melimpah. Energi surya, panas bumi, air, dan angin selalu ada selama bumi berputar. Sedangkan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara akan semakin mahal dan pasokannya makin berkurang.

"PLN tak mungkin bertahan jika diteruskan menggunakan energi fosil seperti saat ini. Hanya soal waktu kemampuan finansial terkuras untuk bayar batu bara dan minyak bumi. Itu di luar kemampuan PLN," tegas dia.

Dia mengingatkan harga batu bara akan cenderung terus mahal karena biaya eksplorasi makin tinggi. Awalnya memang murah karena batu bara masih di atas tanah, semakin lama batu bara harus diambil dari dalam tanah yang main dalam sehingga biaya makin tinggi.

"Energi fosil sudah pasti akan habis, selain menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tidak ada yang lebih murah dari EBT," tandas Susilo.

Tidak Serius

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan, Hadi Djatmiko, mengatakan pemerintah sebaiknya tidak meneruskan kebijakan yang kontradiktif dengan membuat komitmen mewujudkan lingkungan hijau, tapi dalam praktiknya terus menambah tambang batu bara dan menggunakannya untuk pembangkit listrik, serta tidak serius memulai pengembangan EBT secara signifikan.

"Kontradiksi tersebut akan membuat dunia memandang sinis Indonesia. Pemerintah mesti benar-benar segera menunjukkan *political will*, dukungan nyata pada pengembangan EBT," tegas dia.

Terkait dengan rencana penerbitan **green bond** Indonesia, **Financial Times** mengemukakan bahwa dilema bagi investor **green bond** Indonesia adalah bagaimana keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan lingkungan yang ambisius. Indonesia mengandalkan energi batu bara lebih dari setengah produksi listrik. Namun, pemerintah juga menyatakan ingin memacu porsi EBT menjadi lebih dari 20 persen pada 2026, dari porsi saat ini kurang dari 3 persen. (ahm/YK/WP).

Dampak dan Biaya Energi Batu Bara

- Polusi energi kotor menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan yang tidak murah. Biaya perawatan kesehatan dan pengobatan sangat mahal hingga triliunan rupiah ini akan meningkatkan biaya BPJS.
- Dunia telah mengumumkan pengenaan pajak karbon bagi negara dan industri yang menghasilkan emisi karbon. Itu akan menjadi tambahan biaya di luar biaya investasi yang sudah mahal. Jika tidak murah, mengapa tidak langsung saja investasi ke pembangkit EBT.
- Sekarang energi batu bara menjadi tidak murah. Untuk membersihkan atau mengurangi polusi juga membutuhkan teknologi dengan biaya tambahan.
- Tren harga batu bara sedang naik, demikian juga minyak bumi. Maka, tidak tepat jika menganggap pembangkit listrik tenaga (PLT) minyak bumi dan batu bara itu murah.

ooo00ooo

Sumber : KORAN JAKARTA
Edisi : 3.304 / Tahun X
Hari/Tgl. : Senin, 26 Februari 2018
Halaman : 1 (headline)
Judul : Kebijakan Energi/PLN Terperangkap Sumber Energi Mahal dan Polutif
"Kenaikan Biaya Batu Bara Rp15 Triliun Setara 1.200 MW Pembangkit EBT Baru".